

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOPERASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Juliman

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP. Universitas Musi Rawas Jalan
Pembangunan Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Kelurahan. Air Kuti
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Telp (0733) – 451900
gmyjuliman@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan Peneli dalam penelitian ini adalah untuk menemukan model pemberdayaan lembaga koperasi yang ada di lokasi penelitian, dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik analisis data meliputi tiga komponen analisis yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan Miles dan Huberman. Informan penelitian berjumlah 07 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi, Kasi Organisasi dan Hukum, Kasi Diklat dan penyuluhan, Kasi pengawasan koperasi, dan 03 Orang Staf. Data hasil penelitian adalah dari 730 unit lembaga koperasi di lokasi penelitian diketahui ada 152 unit lembaga koperasi tidak aktif. Data ini menunjukkan bahwa ternyata lembaga koperasi yang tidak aktif sebesar 11 % dari keseluruhan koperasi yang ada, yang dapat dijadikan tolok ukur untuk pemberdayaan Lembaga Koperasi kedepan, yang dapat diukur dari aspek Perencanaan, Sosialisasi, hambatan dalam pemberdayaan Lembaga Koperasi, tingkat pendidikan dan pemahaman pengurus dan anggota koperasi, Sebaran lembaga koperasi, Sitem pengangkatan pengurus koperasi dan Anggaran.. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan data skunder yang diperoleh darilokasi penelitian, dilaksanakan mulai dari Tanggal 06 Bulan Mei sampai dengan Tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2015 di Palembang dan 07 bulan November sampai dengan 12 November 2015 yang terdiri dari 02 angkatan dilaksanakan di Hotel Sempurna Lubuklingga,. melalui sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi yang dilaksanakan oleh bagian bina lembaga koperasi dengan mengundang lembaga-lembaga koperasi dan dihadiri oleh utusan dari masing-masing koperasi yang diundang. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi dari kepala bidang koperasi Provinsi Sumatera Selatan, dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA). Untuk peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi, dilaksanakan melalui studi banding dengan lembaga-lembaga koperasi baik di dalam maupun di luar tempat penelitian dan dilakukan kontrak kerjasama Hambatan terletak pada rasio antara pegawai bidang kelembagaan koperasi dengan sebaran dan jumlah lembaga koperasi yang ada belum seimbang, tingkat pendidikan dan pemahaman pengurus dan anggota lembaga koperasi masih lemah dan belum mencukupinya anggaran.

Kata Kunci : pemberdayaan lembaga koperasi.

Abstract

This research aimed to find cooperative empowerment model by descriptive methods and qualitative approach analyzes. Data collected by obesrvation, interview, and documentation. They were analyzed by reduction, data presented, and Miles and Hubermen theory. There were 7 informant that consisted of developoment sub-head, law and organization section head, training and informing

section head, supervising section head, and 3 staffs. Data source of 730 cooperative units that consisted of 152 non-active cooperative units. This data showed that around 11% of non-active cooperative units as the basis of further empowerment through plans aspect, socialization, the barrier of cooperatives empowerment, education level of management and members, spread of cooperatives location, and appointment of management and budgets. Empowerment activity conducted based on the secondary data from research field that started from 6-22 of May in 2015 at Palembang and 7-12 November 2015 that consisted of two sessions conducted in hotel Sempurna city of Lubuklinggau. Socialization principles towards cooperatives conducted by development cooperative section that presented by the representatives of cooperatives. Empowerment cooperatives conducted and presented by head of cooperative from South Sumatera province dan the Indonesian Cooperatives councils. In developing and extended cooperation networks conducted by official field visiting both in local and regional, and signature of contract in the field of the ratio of staffs, a number of cooperatives, the level of education of management and members, and limited budgets of cooperative members.

Key words: *cooperatives empowerment*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi diharapkan dapat menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Pola pengorganisasian yang melibatkan partisipasi setiap anggota dan tujuannya adalah pembagian hasil usaha yang cukup adil menjadikan koperasi sebagai harapan pengembangan perekonomian Indonesia. Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program tersebut adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama berkeinginan atau

punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang perekonomiannya lemah akan tetapi juga milik mereka yang tingkat perekonomiannya sudah tinggi. Hal ini karena atas dasar koperasi sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan, yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang diatur pada pasal 3 UU. No. 25 tahun 1992 (dalam Subandi 2010:20) adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Data menunjukkan bahwa jumlah koperasi sampai dengan 31 Desember 2012 di Indonesia tercatat sebanyak 194.295 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.869.439 orang, hal itu menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia begitu banyak yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan baik dikalangan bawah maupun di kalangan menengah dengan adanya koperasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata, makin banyak koperasi berstatus tidak aktif.

Hingga akhir Desember 2013, yaitu sebanyak 29,74 persen koperasi di Indonesia tidak aktif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ada 60.584 koperasi yang tidak aktif dari keseluruhan 203.701 unit. *Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Desember 2013. Jakarta, Kompas. Com (diakses Rabu 08 Maret 2014 / 12:00 WIB)* Secara kuantitas koperasi di Indonesia jumlahnya sudah cukup tinggi, namun secara kualitas masih perlu dipertanyakan apakah koperasi tersebut benar-benar berjalan secara sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Dan hal senada juga terjadi pada jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 5.122 unit koperasi, jumlah koperasi yang aktif 4.609 dan jumlah kopersai yang tidak aktif adalah 513 unit koperasi, dengan jumlah anggota 798.588, (Data diolah Tahun 2015). Data di tempat penelitian menunjukkan bahwa dari 730 unit lembaga koperasi ternyata 152 unit koperasi yang tidak aktif. Data ini

menunjukkan bahwa tidak aktif berjumlah 11% dari keseluruhan koperasi yang ada

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya pemberdayaan Lembaga Koperasi yang dilakukan pada lokasi penelitian.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif melalui tahapan i dari observasi, kepustakaan, wawancara dan Dokumentasi dan dianalisis mulai reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2013:246).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan lembaga koperasi merupakan fungsi bidang kelembagaan koperasi untuk menciptakan lembaga-lembaga koperasi yang mempunyai pandangan bahwa koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, adanya kemandirian, adanya kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen yang handal, adanya ketersediaan, adanya akses dalam berbagai bidang serta jaringan usaha. Jadi kesimpulan sementara bahwa upaya yang dilakukan oleh bidang kelembagaan tujuannya sudah sesuai dengan pendapat Saripah dan Herawati (2011:15). Dalam melaksanakan pemberdayaan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh bidang bina lembaga koperasi, sebelum melakukan pemberdayaan terlebih dahulu melakukan pendataan. Dari hasil pendataan tersebut maka dapat diketahui berapa jumlah lembaga koperasi yang aktif dan yang

tidak aktif untuk dijadikan tolok ukur untuk melakukan pemberdayaan.

Hasil pendataan tersebut menghasilkan data dari 730 unit lembaga koperasi terdapat 152 unit koperasi yang tidak aktif. Data ini menunjukkan bahwa di lokasi penelitian tersebut ternyata lembaga koperasi yang tidak aktif sebesar 11 % dari keseluruhan koperasi yang ada. Dilihat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis pada obyek penelitian, ternyata ada upaya yang dilakukan untuk melakukan aktivitas perencanaan sebelum melakukan upaya pemberdayaan. Sesuai dengan data skunder yang penulis peroleh di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan sementara bahwa hal ini sudah sesuai dengan fungsi bagian bina lembaga koperasi, seksi pendidikan dan penyuluhan mempunyai tugas diantaranya menyusun rencana kerja di bidang organisasi tata laksana dan penyuluhan.

Tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk merealisasikan rencana kerja yang diterbitkan oleh dinas tersebut, yang terdapat pada rencana kerja tahunan yaitu Koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi, Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman koperasi, Pembinaan dan pengawasan serta penghargaan koperasi berprestasi, Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi.

3.1.1 Pelaksanaan

Dari hasil wawancara, observasi dan dengan mempelajari dokumentasi yang ada, koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi dilakukan oleh dinas tersebut melalui pendataan

terhadap lembaga koperasi yang ada untuk dilakukan sosialisasi. Hasil dari pendataan dan sosialisasi tersebut kemudian dilakukan pembinaan oleh dinas koperasi, dan kemudian diusulkan untuk memperoleh dana dari perusahaan-perusahaan untuk menjadi mitra dalam bentuk kepedulian sosial. Menurut keterangan informan dana tersebut dari perusahaan-perusahaan seperti PT. Pertamina dan PT. Mitco yang digulirkan untuk usaha peternakan dan warung serba ada.

Usaha pembinaan dari dinas koperasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pendapat Bang Ken (2010:125-126), Subandi (2010:157) dan Sudarsono dan Edilius (2010:37-53) yang bunyinya antara lain pemberdayaan lembaga koperasi tujuannya untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga koperasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan seperti Perluasan akses permodalan, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan pemanfaatan modal. Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa ada upaya yang dilakukan oleh dinas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi meskipun masih sangat terbatas.

Dari hasil penelitian tersebut, sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi dilaksanakan oleh bagian bina lembaga koperasi dan penyuluhan koperasi dengan mengundang lembaga-lembaga koperasi yang ada. Acara dilaksanakan dengan dihadiri oleh utusan dari masing-masing lembaga koperasi yang diundang. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi dilakukan oleh bagian pendidikan dan latihan dan penyuluhan dari dinas koperasi, kepala bidang koperasi Provinsi

Sumatera Selatan, dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA). Jadwal pelaksanaan upaya pemberdayaan, menurut informan penelitian yang tentukan peneliti untuk menjadi informan penelitian, hasilnya adalah upaya dilaksanakan dengan tidak terjadwal dan lebih banyak dilakukan satu tahun sekali. Materi yang diberikan dalam sosialisasi tersebut diatas adalah seputar Undang-undang Perkoperasian yang memberikan pemahaman akan pentingnya manajemen kelembagaan koperasi.

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa bagian bina lembaga koperasi pada dinas tersebut sudah melaksanakan sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman koperasi, namun dapat dikatakan belum maksimal dan belum sesuai dengan Bab 1 pasal 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 Tentang pedoman Revitalisasi Koperasi. Dari hasil penelitian yang ada di lokasi penelitian tersebut, pemberdayaan melalui pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dilaksanakan oleh bagian kelembagaan koperasi dengan mengundang lembaga koperasi yang ada.

Acara dilakukan dengan dihadiri oleh utusan dari masing-masing koperasi yang diundang. Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara bersama-sama dalam gedung, kemudian diadakan pembinaan dengan mengunjungi lembaga-lembaga-koperasi dilokasi penelitian tersebut. Dari hasil penelitian penulis pada dinas tersebut, bagian kelembagaan koperasi sudah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudarsono dan Edilius (2010:37-53) baik dibidang organisasi maupun manajemen yaitu aspek organisasi untuk meningkatkan jumlah keanggotaan, melalui penyuluha dan pelayanan yang lebih baik, pembinaan untuk untuk menyempurnakan struktur organisasi koperasi, pembinaan untuk menyempurnakan pembagian tugas secara tertulis untuk memperjelas tugas wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi koperasi, pembinaan untuk pengelolaan organisasi melalui tertib administrasi, seperti buku-buku, surat keluar dan masuk serta pelaporan rutin oleh organisasi koperasi. Menurut pendapat Subandi (2010:157) yang menyatakan antara lain Peningkatan kualitas penyenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait sudah sesuai dengan yang dilaksanakan oleh bagian kelembagaan atau bina usaha koperasi Kabupaten Musi Rawas. Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa pemberdayaan melalui pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi sudah dilaksanakan.

Penelitian ini juga menghasilkan bahwa, peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi dilakukan oleh dinas koperasi melalui pendataan terhadap koperasi-koperasi yang ada di lokasi penelitian tersebut, kemudian melakukan sosialisasi. Hasil dari pendataan dan sosialisasi tersebut kemudian dipublikasikan kepada seluruh lembaga koperasi untuk melaksanakan koordinasi

melalui pameran produk-produk unggulan dari masing-masing koperasi yang ada pada data dinas koperasi. Peran dari dinas koperasi, tersebut adalah memfasilitasi kegiatan pameran pembukaan dan penutupan pameran, kemudian untuk pelaksanaan pameran oleh dinas koperasi diserahkan kepada dewan koperasi Indonesia daerah tersebut (DEKOPINDA).

Untuk mewujudkan koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi selanjutnya oleh bagian bina lembaga koperasi dinas koperasi tersebut, dilakukan bersama-sama dengan dewan koperasi Indonesia daerah, melakukan seleksi untuk menentukan koperasi mana saja yang layak untuk diikuti ke pameran tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Dari penyelenggaraan pameran tersebut akan timbul jaringan kerja sama antar koperasi baik di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional, untuk perkembangan baik bagi koperasi yang belum maju maupun bagi koperasi yang sudah maju. Selain itu untuk menamba jaringan usaha kerjasama, dilakukan melalui studi banding dengan koperasi-koperasi yang berperintasi di luar daerah lokasi penelitian tersebut. Selajutnya penelitian ini dapam mengetahui bahwa bagian kelembagaan sudah melaksanakan peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi hal ini didukung oleh pendapat Subandi (2010:157) yang antara lain pemberdayaan koperasi dilakukan dengan penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar lembaga koperasi.

Di kemukakan juga oleh Bang Ken (2010:125-126) melalui usahanya mengembangkan koperasi dengan beberapa hal penting yang antara lain peningkatan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar baik di daerah, regional, nasional, juga internasional.

Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa di lokasi penelitian peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi sudah terlaksana secara rutin, baik di dalam wilaya penelitian maupun di luar lokasi penelitian. Hal di atas sesuai dengan pendapat Rivai dan Mulyadi (2009:411) bahwa pemberdayaan melalui pebinaan organisasi merupakan suatu proses yang dapat mengembangkan organisasi, karena pengembangan organisasi adalah suatu proses meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu organisasi, merupakan suatu pendekatan situasional untuk meningkatkan efektivitas organisasi, lebih menekankan pada sistem sebagai sasaran perubahan, meliputi perubahan yang sengaja direncanakan sudah terlaksana.

3.1.2 Hambatan Yang Dihadapi

Hambatan yang dialami dalam upaya pemberdayaan lembaga koperasi adalah masih banyaknya lembaga koperasi yang ada di lokasi penelitian tersebut yang belum mengerti prinsip-prinsip perkoperasian dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Kenyataan menunjukkan bahwa lembaga koperasi seringkali hanya dikuasai oleh pengurus dan anggota tidak mengerti apa-apa tentang jalannya lembaga koperasi, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang

ada di lembaga koperasi pada umumnya diangkat berdasarkan kepercayaan dan bukan kompetensi. Maka perlu di giatkan lagi untuk memberikan pemahaman seperti yang dikemukakan oleh Widiyati (2010:35) adalah dari, oleh dan untuk anggota. Selanjutnya Motis dan Swasono (2004:29) mengemukakan bahwa Koperasi juga disebut sebagai *Self Help Organization* (SHO) yang menekankan agar partisipasi anggota di dalam koperasi harus dalam kerangka untuk menolong dirinya sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Pemberdayaan secara kolektif dilakukan terhadap lembaga koperasi dengan mengundang seluruh lembaga koperasi, tapi kenyataannya dilihat dari data yang berupa daftar hadir peserta dari dinas koperasi Kabupaten Musi Rawas ternyata dari 730 Unit Koperasi hanya 50 Unit Yang menghadiri undangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dari pengurus lembaga koperasi untuk lebih memahami perihal tatakelola lembaga koperasi. Pegawai bidang kelembagaan koperasi, dilihat dari jumlah maupun dari tingkat pendidikan dari analisa penulis dengan melihat struktur organisasi ternyata belum memadai, dimana dari jumlah koperasi yang ada yang dapat dilihat dari laporan keragaan lembaga koperasi yang ada di dinas koperasi sebanyak 730 unit lembaga Koperasi hanya dilakukan oleh pegawai yang berjumlah 06 Orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa belum seimbang antara jumlah pegawai yang ada dengan jumlah lembaga koperasi yang ada di tempat penelitian tersebut yang dapat menyebabkan kurang optimalnya upaya pemberdayaan.

Selanjutnya kelemahan dapat diketahui dari banyaknya lembaga koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan yang tidak mengundang pihak dinas koperasi. Dan bahkan tidak melaporkan dan memberikan tembusan perihal Rapat Anggota Tahunan kepada dinas koperasi, padahal surat dikirim kepada lembaga koperasi untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan tapi tidak ditindaklanjuti. Padahal acara tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan tentang kelemahan-kelemahan bagi lembaga koperasi selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya belum mencukupinya anggaran pada bidang bina lembaga koperasi untuk melakukan usaha pemberdayaan, sehingga usaha pemberdayaan hanya dilakukan secara kolektif pada suatu tempat dengan mengundang peserta dari lembaga.. Hal ini juga dikarenakan oleh terlalu luasnya wilayah lokasi penelitian tersebut dan tidak seimbang antara kuantitas lembaga koperasi yang ada dengan personil pegawai yang ada, sehingga sulit bagi pegawai dinas koperasi yang berhubungan dengan bina lembaga koperasi untuk mendatangi lokasi lembaga-lembaga koperasi.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian berupa pendataan terhadap lembaga koperasi aktif dan tidak aktif sebagai wujud perencanaan pembinaan koperasi sudah dilakukan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi hasil dari pendataan dan sosialisasi tersebut kemudian dilakukan usaha pemberdayaan melalui pembinaan

oleh dinas koperasi melalui bagian bina lembaga koperasi kemudian diusulkan untuk memperoleh dana dari perusahaan-perusahaan yang ada pada lokasi penelitian sebagai bentuk kepedulian sosial.

Kegiatan koordinasi dilaksanakan mulai dari Tanggal 06 Bulan Mei sampai dengan Tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2015 di Palembang dan 07 bulan November sampai dengan 12 November 2015 yang terdiri dari 02 angkatan dilaksanakan di Hotel Sempurna Kota Lubuklinggau, selanjutnya koordinasi dilaksanakan di Lembaga-lembaga Koperasi dengan materi antara lain, menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan teknis dibidang bina lembaga koperasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pemberdayaan dibidang pengembangan kewirausahaan koperasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan dan penyediaan sumber dana dan syarat pemenuhan dana serta kemitraan dibidang pengembangan kewirausahaan koperasi.

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi dilaksanakan dengan mengundang dan diikuti oleh utusan dari masing-masing koperasi yang diundang. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi dilakukan oleh bagian bina lembaga koperasi pada Dinas Koperasi, kepala bidang kelembagaan koperasi Provinsi Sumatera Selatan, dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) kemudian dilanjutkan dengan usaha pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi sampai dengan terpilihnya koperasi yang berprestasi. Untuk peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama

Usaha Koperasi, dilaksanakan melalui studi banding dengan lembaga-lembaga koperasi baik di dalam maupun di luar tempat penelitian dan dilakukan kontrak kerjasama. Termasuk dengan perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan kerjasama sebagai bentuk kepedulian sosial.

Hambatan terletak pada rasio antara pegawai dengan jumlah koperasi yang ada, tingkat pendidikan, pemahaman pengurus dan anggota lembaga koperasi. Dan belum mencukupinya anggaran untuk melakukan usaha pemberdayaan terhadap Lembaga Koperasi yang ada di lokasi penelitian. Dari simpulan diatas maka dapat disarankan:

1. Perlu ada perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pelaksanaan sosialisasi pemahaman koperasi.
2. Meningkatkan usaha pemberdayaan di melalui pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi, sistem informasi perkoperasian.
3. Rasio antara jumlah pegawai hendaknya diseimbangkan.
4. Perlu adanya peningkatan pendidikan baik formal dan informal, baik pada dinas maupun pada pengurus dan anggota koperasi.
5. Perlu adanya penyesuaian dana
6. Sebelum lembaga koperasi mengajukan Badan Hukum, perlu ada usaha dari Dinas Koperasi untuk diberikan pemahaman tentang tata kelola lembaga koperasi.
7. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Perguruan Tinggi yang mengerti tentang karakter pengurus dan anggota organisasi.
- 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin Norman K. & Lincoln Yvonna S. 2011 *The Sage Handbook of Qualitative Research* 1 Edisi ketiga Yogyakarta Pustaka Pelajar Iqbal Mohammad. 2010. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)* Jakarta. Elex Media Komputindo PT.
- Lip Saripah dan Rr. Erna Herawati. 2011. *Manfaatkan Koperasi dan UMKN. Tindak Lanjut Program PKH PNFI*. Bandung: April Media. Mutis Thoby. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta Garasindo PT.
- Pasolong Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV Radhi Fahmi. 2010. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat Antara Komitmen dan Jargon*. Jakarta. Republika.
- Ropke Jochen. 2012. *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sudarsono & Edilius. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta PT.
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi, Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suwatno dan Priansa. 2011 *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* Bandung: Alfabeta, CV. Wibisono
- Dermawan. 2013. *Panduan penyusunan skripsi, Tesis & disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, CV. Widiyati Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta PT.
- Jurnal Vol 4 No 2, September 2014 analisis kinerja keuangan koperasi sebelum dan setelah diswamitrakan pt.bank bukopin,tbk cabang denpasarkomang purnama dewi agus wahyudi salasa gamafakultas ekonomi universitas mahasaraswati denpasar
- Jurnal Ekonomi, Volume 15 Nomor 2, Juni 2013 Copyright @ 2013, oleh Program Pascasarjana, Universitas Borobudur Faktor Internal dan Eksternal Kinerja Koperasi Simpan Serta Implikasinya pada dampak Koperasi (Cooperative Effect) di DKI Jakarta.
- Undang-Undanga Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 01/Per/M.KUKM.2013 Tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi;
- Data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Desember 2013. *Makin Banyak Koperasi Berstatus Tidak Kktif*. Jakarta, Kompas.com (Rabu 08 Maret 2014 | 12:00 WIB)
- http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_diakses_hari_sabtu 16 Agustus 2015.